

DEMOKRATISASI DI INDONESIA : PERGESERAN PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM KELOMPOK SOSIAL PEDESAAN (DESA JAMBANGAN) DI KABUPATEN NGAWI

Oleh :

Arif Darmawan, Rachmawati Novaria, Tri Yuliaty

FISIP Untag Surabaya

E-mail of the corresponding author: arifdarmawa002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini lebih memusatkan perhatian terhadap adanya otomi daerah tahun 1999 yang sudah lebih dari 17 tahun , Perhatian terhadap pergeseran peran tokoh masyarakat di pedesaan khususnya di desa jambangan hal ini merupakan esensi dari demokratisasi.

Metode yang digunakan lebih menekankan pada diskriptif kualitatif dengan mengacu pada data dokumen yang di elaborasi dengan proses wawancara terbuka

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada seluruh bagian dapat ditegaskan bahwa Pada pergeseran peranan tokoh kelompok sosial di pedesaan

Ngawi ditemukan adanya tata nilai yang konsisten/ajeg dan terbuka yang dapat menjamin sirkulasi. Tata nilai yang konsisten dan terbuka tersebut berdasarkan atas pemilikan seseorang terhadap :

- a) Kemampuan individu terhadap teknologi dan informasi
- b) Kemampuan ekonomi yang tidak selalu bersumber dari tanah pertanian yang dikelola secara tradisional, tetapi juga bersumber pada pekerjaan diluar tanah pertanian .
- c) Pendidikan umum yang relatif tinggi dari masyarakat sekitarnya
- d) Moral dan norma yang didasarkan atas agama/ kepercayaan dan budaya. setempat

Adanya kejelasan tata nilai dan sah dalam masyarakat serta terbuka untuk setiap orang dalam rekrutmen pemimpin sosial masyarakat akan menjamin terjadinya pola sirkulasi Pemimpin. Sekalipun pola ini berjalan lambat tetapi sangat kondusif dalam proses menuju sistem politik yang demokratis\

Kata Kunci :

Demokratisasi – Pergeseran Peran – Munculnya Tokoh Masyarakat

1. Pendahuluan

Dinamika masyarakat di Ngawi bisa dikelompokkan dari sudut pandang, kehidupan pedesaan yang ditandai dengan sebagian besar pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kehidupan perkotaan yang sebagian besar pendapatan penduduk di peroleh dari sektor bisnis perdagangan dan pegawai baik pemerintahan maupun swasta. Dan ada lagi kelompok

tengah yang sebsar pendapatannya diantara kedua usaha tersebut. Penduduk pedesaan yang di jadikan penelitian ini adalah penduduk desa yang hidup di wilayah desa Jambangan . Desa Jambangan secara geografis terletak di dalam wilayah administratif kecamatan Paron , kabupaten Ngawi , propinsi Jawa Timur . Di sebelah utara berbatasan dengan desa Ngale dan desa Gelung, di sebelah timur berbatasan dengan desa Paron, sebelah selatan berbatasan dengan desa Semen . Dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Teguhan dan desa Jemblongan Keberadaan desa yang berada di bawah lereng gunung Lawu, mempunyai pengaruh yang penting terhadap kesuburan tanahnya. Dari dataran yang lebih tinggi dari letak desa itu terdapat sumber-sumber mata air, yang kemudian dialirkan oleh beberapa sungai menuju dataran yang lebih rendah . Ke dua sungai itu mempunyai peranan yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat. Pertama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti untuk mencuci, mandi, buang air, dan sebagainya. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan air sawah-sawah. Terdapat 1 saluran irigasi teknis, 3 buah saluran irigasi setengah teknis, dan 4 buah saluran irigasi sederhana; yang kesemuanya berguna untuk mengaliri kebutuhan air sawah-sawah penduduk.

Desa ini dibagi ke dalam empat dusun dan masih dibagi lagi secara administratif ke dalam 19 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT). Tiap-tiap dusun yang ada tersebut tersebar di seluruh wilayah desa, dan masing-masing dusun mempunyai wilayah dan penduduknya sendiri.

Luas areal tanah meliputi 396, 488 hektar, dibedakan menjadi 320,778 hektar tanah sawah (90,90%), 8,413 hektar (2,12 %) tegalan 63,607 hektar (16,07 %) pekarangan, 2,450 hekta (0,62 %) tanah yang digunakan untuk makam, dan 1,150 hektar (0,29 %) tanah yang digunakan untuk kolam ikan. Dari seluruh areal tanah sawah yang ada (320,778 hektar) itu, 308,478 hektar (96,17 %) merupakan sawah sanggeman atau sawah milik pribadi, baik milik pribadi masyarakat desa Jambangan sendiri maupun orang-orang di luar desa itu. Sedangkan 12,30 hektar (3,83 %) sisanya, merupakan sawah bengkok atau kas desa, yang merupakan sawah lungguh para perangkat desa selama mereka menduduki jabatan.

Jumlah penduduk yang tercatat dalam monografi desa pada tahun 2016 sebanyak 5,054 orang, yang terdiri dari 2,487 orang (49,79 %) laki-laki dan 2.567 orang (50,21 %) wanita. Jika luas wilayah adalah 396,488 hektar, maka kepadatan penduduk rata-rata setiap hektarnya adalah 12,75 orang. Dari seluruh penduduk desa itu tersebar ke dalam 1.066 kepala keluarga (KK), dan ini berarti rata-rata anggota setiap keluarga adalah 4,74 orang.

Berdasarkan komposisi usia penduduk maka dapat dibedakan : 1.404 orang (27,78 %) yang berusia anak-anak atau berusia di bawah 15 tahun, 3,397 orang (67,21 %) yang berusia

dewasa atau yang berusia antara 15 tahun hingga 59 tahun, dan sisanya yang 253 orang (5,01%) adalah mereka yang berusia lanjut atau berusia lebih dari 59 tahun. Dengan demikian maka rata-rata tanggungan hidup rata-rata setiap penduduk yang berusia produktif atau usia dewasa terhadap usia tak produktif (anak-anak dan lanjut usia), adalah 0,49.

Luas pemilikan tanah para petani besar ini berkisar antara 1 hektar sampai 4,5 hektar. Total luas sawah yang dimiliki seluruh petani besar ini adalah 58,8 hektar, atau 18,33 % dari seluruh sawah. Luas rata-rata pemilikan tanah tiap petani besar ini adalah 2,1 hektar. Hampir seluruh sawah yang dimiliki para petani besar ini adalah merupakan hasil warisan yang dibawa baik oleh pihak suami maupun pihak Istri dalam suatu keluarga, oleh karenanya keluarga adalah merupakan suatu unit analisa sosial ekonomi yang tepat dalam masyarakat pedesaan. Dari catatan jual beli tanah di desa Jambangan, tidak nampak cukup nyata tentang adanya pemusatan pemilikan tanah, terutama selama lima tahun terakhir ini. Artinya baik petani kaya maupun petani miskin, mempunyai kemungkinan yang hampir sama dalam hal menjual atau membeli tanah.

Pekerjaan pokok di luar sektor pertanian dapat dibedakan antara 150 orang yang bekerja di sektor formal dan 536 orang penduduk yang bekerja di sektor informal (pekerjaan di luar sektor pertanian dan formal). Penduduk yang bekerja di sektor formal adalah mereka yang menjadi pegawai negeri sipil maupun ABRI, dan pegawai swasta. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor informal adalah 138 orang yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai pedagang, 89 orang yang bekerja di berbagai sektor jasa (seperti tukang kayu, tukang batu, pengangkutan), dan 309 orang yang bekerja di berbagai industri rumah tangga.

Suatu hal yang menarik dari segi pekerjaan penduduk desa Jambangan ini adalah adanya cukup banyak penduduk yang mengembangkan berbagai usaha industri rumah tangga. Ada 5 orang yang mempunyai usaha kerajinan batu merah dan 2 orang lainnya mempunyai usaha rumah tangga berupa kerajinan bambu. Dan sekitar 6 orang mempunyai usaha kerajinan tanah liat.

Pengembangan industri rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal ini dapat diartikan sebagai suatu upaya masyarakat, untuk mengatasi keterbatasan kesempatan kerja dan tingkat upah yang rendah di sektor pertanian. Tingkat upah buruh di sektor pertanian ini, misalnya mencangkul adalah sebesar Rp 2500 yang biasanya dikerjakan pada pagi hari dan atau sore hari dengan mendapat kiriman nasi dan minuman. Untuk upah megawe atau membajak adalah sebesar Rp. 3500. Sedangkan upah ani-ani (memetik padi), yang kemudian dirontokan dan dikeringkan, adalah dengan sistem bawon, yaitu para pemetik mendapat bagian seperdelapan dari hasil petikannya.

Hubungan sosial antar warga masyarakat dan antara warga desa itu dengan masyarakat luar desa, sangat dimungkinkan oleh adanya prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi. Prasarana transportasi dalam masyarakat ini berupa jalan beraspal kelas IV sepanjang 2 km, jalan berbatu sepanjang 13 km, dan jalan-jalan tanah lainnya. Jalan kelas IV itu adalah merupakan bagian dari jalan tembus antara Magetan dan Ngawi yang melewati wilayah desa Jambangan. Jalan berbatu yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat desa Jambangan sendiri adalah jalan yang menghubungkan dusun-dusun di desa itu sendiri. Di samping itu juga masih banyak jalan-jalan tanah, baik berupa gang dalam dusun-dusun maupun jalan antar dusun.

Sarana transportasi yang dimiliki oleh warga sendiri antara lain adalah 7 buah mobil angkutan umum, 1 truk angkutan barang, 69 buah sepeda motor, dan 228 buah sepeda, 7 buah mobil angkutan umum yang ada adalah milik beberapa pengusaha desa. Sedangkan 69 sepeda motor milik pribadi itu adalah milik para penduduk yang mampu, seperti petani besar, pegawai negeri, pedagang, dan sebagainya. Dan alat transportasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa ini adalah sepeda, sehingga setiap warga desa akan mudah mendapatkan pinjaman, apabila sewaktu-waktu memerlukan, dari tetangganya atau saudaranya.

Hubungan sosial dengan sesama warga dusun atau dengan warga dusun lain sedesa dan juga dengan warga luar desa yang dekat, ditempuh terutama dengan berjalan kaki, karena keterbatasan pemilikan pribadi alat-alat transportasi. Sedangkan untuk bepergian ke kota atau ke kantor kecamatan dan juga ke wilayah luar desa yang lain, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana angkutan umum. Terdapat beberapa sarana angkutan umum lainnya, antara lain ojeg sepeda motor, dan banyak "colt pick up" yang dimiliki beberapa penduduk.

Salah satu sarana yang dapat memperlancar terjadinya komunikasi sosial antar warga masyarakat adanya listrik masuk desa. Semenjak akhir tahun 1987 yang lalu program listrik masuk desa telah menjangkau seluruh dusun-dusun. Pengaruh listrik masuk desa ini terhadap kehidupan sosial masyarakat desa juga kelihatan, terutama karena dengan penerangan yang memadai aktifitas sosial masyarakat pada malam hari tidak terlalu dihambat oleh gelapnya malam. Beberapa penduduk juga memasang penerangan atau lampu-lampu listrik di pinggir-pinggir jalan dalam suatu kegiatan mereka yang dinamakan neonisasi.

2. Kelompok sosial pedesaan

Masyarakat desa Jambangan, kecamatan Paron, kabupaten Ngawi meskipun dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan yang masih sederhana, akan tetapi bukan merupakan bentuk masyarakat yang sama sekali homogen. Masyarakat ini dapat dikatakan

sebagai heterogen, terutama apabila melihat masyarakat dari individu-individu dan asosiasi-asosiasi yang beragam dan masing-masing mempunyai perbedaan dalam berbagai dimensi.

Studi tentang struktur sosial terutama dipusatkan pada distribusi seluruh anggota masyarakat dalam posisi-posisi yang berbeda dan asosiasi-asosiasi sosial . Penduduk menempati posisi-posisi yang berbeda-beda juga, karena mereka menjadi anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda atau karena mereka berbeda dalam status sosial yang bertingkat. Posisi-posisi sosial mereka yang nyata seperti hubungan-hubungan di antara mereka, diwujudkan dalam pola-pola asosiasi-asosiasi yang dapat diobservasi.

Konsep dari struktur sosial sendiri adalah merupakan suatu abstraksi dari pola-pola yang dapat diobservasi , yang secara empiris melandasi struktur yang diabstraksikan dari posisi-posisi sosial dan dalam peranan yang berbeda-beda.

Didalam studi ini akan dibahas secara khusus tentang parameter nominal, yang membagi masyarakat desa Jambangan ke dalam beberapa sub-grup atau kelompok-kelompok sosial dalam batas yang berbeda. Sekalipun menyadari bahwa tidak ada tingkatan golongan yang inheren di antara kelompok-kelompok, namun secara empiris keanggotaan kelompok dapat dihubungkan oleh perbedaan status yang hirarkhis.

Dalam konteks masyarakat, di desa Jambangan ini terdapat berbagai asosiasi seperti kelompok penduduk berdasarkan persamaan jenis kelamin, pekerjaan, agama, garis keturunan, lokalitas tempat tinggal, dan sebagainya. Akan tetapi dalam studi ini hanya akan dibahas tiga pengelompokan sosial yang penting, yaitu pengelompokan berdasar persamaan lokalitas tempat tinggal (kelompok ketetanggaan), berdasar persamaan garis keturunan (kelompok kekerabatan), dan berdasar persamaan agama (kelompok sosial-keagamaan).

Ketiga kelompok sosial tersebut dianggap penting karena merupakan bentuk pengelompokan sosial tradisional yang masih tetap bertahan dan dominan dalam masyarakat desa Jambangan . Kelompok-kelompok sosial itu secara nyata juga merupakan wadah bagi seluruh anggotanya untuk melakukan hubungan secara langsung (interpersonal) dan untuk melakukan aktifitas-aktifitas bersama. Tiap-tiap anggota masyarakat desa ini secara otomatis menjadi anggota dari ketiga kelompok sosial itu sekaligus. Misalnya Pak Parjo yang merupakan seorang penduduk disalah satu dusun Jambangan dan beragama Islam, tentu akan menjadi anggota kelompok ketetanggaan dusun Jambangan, menjadi anggota kelompok agama Islam, dan juga menjadi bagian dari kelompok kekerabatan tertentu. Hal yang demikian juga berlaku dalam bentuk yang berbeda-beda terhadap anggota masyarakat yang lain.

Jika kita pandang masyarakat desa Jambangan dengan kaca mata struktural, maka paling tidak ada tiga pengelompokan sosial dan satu stratifikasi sosial tradisional, yang dapat diamat secara empiris. Adanya kenyataan bahwa pengelompokan sosial di desa ini bersifat ganda, mengharuskan kita untuk memandangnya secara menyeluruh bukan hanya dengan memandangnya dalam salah satu sudut saja. Atau justru apabila kita memahami masyarakat ini lebih dari sekedar tiga kelompok sosial dan satu stratifikasi sosial tradisional seperti dalam studi ini, kita akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih baik lagi.]

2.1. Kelompok Ketetangaan

Masyarakat desa Jambangan secara geografis dan administratif dibagi-bagi ke dalam 4 dusun, yang masing-masing mempunyai batas wilayah dan penduduknya sendiri. Dan setiap dusun mempunyai wilayah yang terdiri dari tanah pekarangan, tanah tegalan, dan tanah persawahan. Di dalam wilayah dusun yang berupa pekarangan inilah rumah-rumah penduduk suatu dusun didirikan berdekatan satu sama lain. Karena letak tempat tinggal anggota masyarakat suatu dusun berdekatan satu sama lain dan berada dalam suatu wilayah yang sama, maka mereka dapat dikelompokkan dalam suatu komunitas tingkat dusun. Dengan demikian sekelompok penduduk dalam suatu dusun mempunyai identitas bersama berdasarkan persamaan letak tempat tinggal, dan dapat dibedakan dengan penduduk dusun lain.

Oleh karena tempat tinggal di antara warga suatu dusun berdekatan satu dengan lainnya, maka sangat memudahkan mereka untuk saling berhubungn secara langsung. Di dalam masyarakat yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan sektor non pertanian yang berlokasi di desa itu sendiri, memberi peluang mereka untuk bekerja sama dan berhubungan satu dengan lainnya secara mendalam. Selain itu masyarakat pada umumnya juga mempunyai waktu luang yang cukup, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kontak sosial dengan sesama warga . Bahkan dalam masyarakat desa ini juga dikenal suatu kebiasaan sonjo, yaitu kebiasaan untuk saling mengunjungi tetangga dengan maksud sekedar ngobrol, terutama pada waktu-waktu luang. Hubungan sosial di antara warga suatu dusun terutama terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara langsung atau tatap muka, sehingga tidak mengherankan apabila setiap anggota kelompok ketetangaan saling mengenal secara pribadi satu dengan lainnya. Akan menjadi sesuatu yang tidak lumrah apabila seorang anggota dari kelompok ini tidak mengenal anggota yang lain, meskipun hanya seorang. Lebih dari sekedar hubungan interpersonal di antara warga suatu dusun, maka hampir seluruh penduduk membutuhkan bantuan dari anggota yang lain, dalam

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hubungan saling tergantung di antara mereka diwujudkan dalam kegiatan tolong menolong (tolong menolong), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk saling membantu di antara tetangga yang sedang mempunyai hajat atau sedang kesusahan. Ada beberapa bentuk tolong menolong dalam masyarakat, antara lain sambatan, sumbangan uang, dan ngirim blanjaan.

Sambatan adalah merupakan suatu bentuk bantuan berupa tenaga kerja, misalnya membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah dan sebagainya. Sumbangan uang adalah bantuan kepada orang lain berupa uang atau sering disebut rukun sanak (rukun saudara), bantuan ini diberikan pada acara perkawinan, kematian, khitanan, dan kelahiran. Sedangkan ngirim blanjaan adalah bentuk bantuan berupa bahan-bahan makanan seperti beras, kelapa, bumbu-bumbu dan sebagainya. Sedangkan di pihak yang dibantu juga mempunyai kewajiban untuk munjung yaitu memberi makanan (biasanya berupa nasi, sayur, dan lauk-pauk) kepada tetangga mereka, sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka.

Kegiatan tolong menolong di antara warga desa merupakan bentuk perwujudan dari solidaritas dan saling ketergantungan di antara mereka. Mereka sendiri menyebut tetangga sebagai tangga, dan mereka anggap sebagai kependekan kata digotong dan direnggo. Digotong dapat diartikan sebagai diangkat bersama-sama, sedangkan direnggo diartikan ditanggung. Tetangga dengan demikian adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah (tangga teparo), yang akan membantu dan kita bantu apabila sedang mempunyai hajat atau kesusahan.

Hubungan fungsional di antara tetangga dalam suatu dusun, juga terwujud dalam kegiatan pertanian terutama dalam pengolahan sawah. Seperti telah dikemukakan di depan, bahwa sebagian besar penduduk desa Jambangan mempunyai pekerjaan pokok di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik, petani-buruh, dan buruh tani. Para petani pemilik biasanya memerlukan bantuan tenaga kerja untuk mengerjakan sawahnya, dan pada umumnya mereka cenderung meminta bantuan tenaga kepada para tetangga dekatnya yang merupakan tani buruh dan buruh tani. Hubungan dalam pekerjaan sektor pertanian baik antara petani pemilik dengan buruh tani atau juga penyakap, dan antara buruh tani dengan buruh lainnya (yang merupakan tetangga-tangga) semakin memperkokoh ikatan sosial antar warga masyarakat tingkat dusun.

Dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat tingkat dusun sebagai suatu komunitas, maka diperlukan suatu kerja sama seluruh warga. Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta membangun, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Oleh karenanya

hampir setiap dusun mempunyai kebiasaan gotong royong untuk membangun dan memelihara jalan-jalan dusun, jembatan, saluran air, pos ronda dan sebagainya. Prasarana dan sarana semacam itu hampir seluruhnya merupakan hasil swadaya masyarakat sendiri, meskipun ada juga yang merupakan bantuan dari pemerintah. Untuk keperluan pendanaan, mereka dapat menarik dari para anggota. Sedangkan untuk keperluan tenaga kerja, mereka mengerahkan tenaga kerja secara bersama-sama (gugur gunung) maupun dengan bergilir.

Secara organisatoris, dusun adalah ada di dalam dan dibawah pemerintahan tingkat desa, sehingga dusun adalah bentuk terendah dari jaringan birokrasi pemerintahan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun atau masih sering disebut kebayan (sebutan lama), yang dipilih oleh masyarakatnya sendiri dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sedangkan dalam dusun-dusun itu, masih dibagi-bagi lagi dalam beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT adalah para pemimpin formal tingkat dusun yang menjadi penggerak masyarakat dusun. Mereka inilah yang menjadi pamong atau pembina masyarakat, yang dipercaya oleh para tetangga mereka.

Suatu bentuk demokrasi tingkat dusun, diwujudkan dalam pertemuan selapanan yang juga disebut sebagai rembug dusun. Pertemuan selapanan ini diselenggarakan setiap tiga puluh lima hari (selapanan berasal dari kata selapan yang berarti tiga puluh lima hari). Pertemuan ini juga disebut rembug dusun karena dalam pertemuan ini dibahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan mereka bersama. Dalam pertemuan ini seluruh peserta mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Di samping itu dalam acara selapanan ini juga dilakukan pengumpulan iuran dari para anggota, yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama mereka.

Dapat dikatakan bahwa kelompok selapanan ini merupakan kelompok inti dalam pengelompokan sosial berdasar persamaan tempat tinggal tingkat dusun. Hal ini disebabkan karena dalam kelompok ini beranggotakan para kepala keluarga laki-laki, yang menjadi pimpinan unit sosial terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Karena kedudukan para anggotanya yang dominan dalam keluarga-keluarga tingkat dusun inilah yang menjadikan kedudukan kelompok selapanan juga paling dominan. Dan hasil rembug dusun mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terhadap kehidupan masyarakat tingkat dusun.

Meskipun kelompok selapanan ini berupaya untuk demokratis, dengan menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan, akan tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya ada beberapa orang yang menduduki posisi yang dominan. Mereka yang dominan ini adalah elit-elit tingkat dusun, yaitu yang disebut wong sugih (orang

kaya), wong piter (orang pandai), dan perangkat dusun. Orang kaya desa ini mempunyai peranan penting terutama dalam mensponsori kegiatan-kegiatan dusun. Wong pinter mempunyai peranan sebagai opinion leader, karena keahliannya atau pengalamannya yang banyak. Sedangkan pamong dusun adalah pimpinan formal yang mempunyai hak dan kewajiban yang sah, untuk membina masyarakat dusun.

Di samping terdapat kelompok selapanan ada juga kelompok wanita dan remaja, dalam tiap-tiap dusun. Kelompok wanita ini terutama diwujudkan dalam organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat dusun. Kelompok PKK tingkat dusun ini pada umumnya kurang berjalan aktif, hal ini terutama disebabkan karena kesibukan mereka di dalam rumah dan di luar rumah tangga mereka, di samping juga karena organisasi PKK kurang dapat memberi manfaat yang nyata. Kesibukan di dalam rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mencuci dan lainnya, telah menyita banyak tenaga dan waktu para wanita ini. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar waktu dan tenaga mereka dihabiskan di dalam rumah, dan kegiatan di luar rumah terutama merupakan tanggung jawab para lelaki.

Sub kelompok ketetangaan lainnya adalah kelompok remaja yang biasanya mempunyai aktifitas membantu dan rekreatif. Kegiatan pemuda yang bersifat membantu ini terwujud dalam kegiatan sinoman, yaitu kegiatan melayani para tamu dalam acara-acara yang ada di dusun. Sedangkan kegiatan yang bersifat rekreatif terwujud dalam kegiatan olah raga dan kesenian. Para pemuda dusun pada umumnya mempunyai waktu luang yang banyak, sehingga seringkali mereka berkumpul dengan teman-teman sebaya mereka. Keakraban di antara pemuda ini dengan demikian menjadi cukup kental.

Kelompok ketetangaan dalam suatu dusun ini pada umumnya mempunyai kekayaan bersama yang disebut sebagai banda dusun. Ada beberapa bentuk banda dusun, antara lain pekuburan, pos ronda, masjid, surau, meja kursi, bala pecah atau berbagai pecah belah. Kekayaan ini merupakan hasil jerih payah dari generasi ke generasi. Hasil iuran warga di tingkat dusun dalam selapanan dan juga hasil jimpitan yang dikumpulkan para petugas ronda, biasanya dipergunakan untuk membeli peralatan yang kemudian menjadi banda dusun. Setiap warga dusun dapat memanfaatkan banda dusun ini sewaktu-waktu mereka membutuhkannya, karena tujuan pengadaan banda dusun memang untuk itu.

Ikatan sosial antar warga dalam suatu dusun juga dipererat dengan adanya acara-acara tradisional seperti nyadran, bersih desa, atau kegiatan dalam rangka memperingati hari nasional atau hari besar keagamaan. Nyadran adalah suatu kegiatan bersama seluruh warga dusun, dan juga mengundang orang luar dusun yang mempunyai leluhur (nenek moyang) yang dimakamkan di dusun tersebut, setahun sekali pada bulan Jawa Ruwah. Kegiatan ini di

adakan dengan tujuan untuk kirim dongak (mengirim doa) kepada arwah leluhur mereka. Beberapa dusun menyelenggarakan kegiatan ini di sekitar kuburan, akan tetapi yang lainnya di rumah penduduk, surau, atau masjid. Untuk menyelenggarakan sadranan ini setiap warga diwajibkan untuk memberi makanan, tenaga maupun uang yang diperlukan. Sedangkan kegiatan bersih dusun dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat yang sering mengganggu keselamatan dan kehidupan warga dusun. Di samping itu juga untuk mengucapkan rasa terima kasih terhadap roh penunggu dusun atau danyang yang baurekso dusun yang telah membantu keselamatan mereka.

Untuk kegiatan dusun dalam memperingati hari nasional terutama setiap hari kemerdekaan, diadakan acara selamatan dan tirakatan. Demikian juga dalam memperingati hari besar keagamaan.

Kegiatan tradisional yang diadakan oleh tiap-tiap warga dusun seperti ngendong bayi dan tirakatan atau lek-lekan pada keluarga yang kesripahan (salah seorang anggota keluarga meninggal) juga masih diadakan. Ngendong bayi adalah acara tirakatan para lelaki pada keluarga yang baru saja mempunyai atau melahirkan anak. Acara ini dilakukan pada malam hari, terutama oleh para tetangganya selama beberapa malam. Dalam ngendong bayi ini, biasanya hanya ada acara main kartu, ngobrol dan tidak ada acara lainnya. Tuan rumah dalam hal ini akan menyediakan minuman dan makanan kecil.

Sedangkan acara lek-lekan (dari kata melek atau membuka mata) juga dilakukan setiap malam selama tujuh malam berturut-turut. Dalam acara ini juga dilakukan tahlil, yang dilanjutkan dengan acara ngobrol sampai tengah malam. Kegiatan kenduren selamatan untuk mendoakan arwah yang meninggal, dilakukan pada hari ke-3 (nelung dina = meniga hari, hari ke 7 (mitung dina), hari ke 40 (matang puluh), hari ke 100 (nyatus), setahun pertama (naun pisan), dua tahun sesudahnya (naun pindo), dan hari ke 1000 (nyewu).

2.2. Kelompok Kekerabatan

Kehidupan masyarakat desa Jambangan pada umumnya berpusat pada somah atau keluarga inti. Setiap somah terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka. Somah yang mungkin berasal dari kata sak omah (satu rumah), adalah satu keluarga yang mempunyai tempat tinggal atau rumah sendiri. Dalam pengertian itu maka seringkali satu rumah dihuni oleh tidak hanya suami, istri dan anak-anaknya; akan tetapi juga orang tua dari suami atau istri, menantu dan cucu-cucu, atau juga saudara-saudara yang lain. Oleh karena

itu yang hidup bersama dalam keluarga inti bersifat menumpang, maka mereka menjadi bagian dari keluarga inti.

Keluarga inti ini adalah merupakan suatu unit sosial ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat desa, karena merupakan pusat kehidupan dari seluruh anggota masyarakat. Sebagai unit sosial, suatu keluarga adalah tempat di mana seluruh anggota keluarga saling berinteraksi secara intensif dan intim satu dengan lainnya. Seorang suami adalah kepala keluarga yang menjadi pimpinan untuk menentukan keputusan-keputusan. Dia juga sebagai suami dari istri, dan ayah dari anak-anaknya, yang harus dihormati (diajani).

Di dalam rumah keluarga-keluarga inti inilah seluruh anggota keluarga tinggal bersama, dan menempati kedudukan sosialnya sendiri-sendiri. Sebagai suatu unit ekonomi terkecil, setiap keluarga adalah satu kesatuan produksi dan konsumsi sekaligus. Seorang suami adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang diandalkan untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggotanya. Sedangkan seorang istri terutama mempunyai tanggung jawab di dalam rumah, yaitu untuk mengurus seluruh kebutuhan sehari-hari keluarga. Berbeda dengan suami yang menjadi pencari nafkah utama keluarga, dengan berbagai cara misalnya mencangkul, menyabit atau merumput, menggembala ternak, dan kegiatan-kegiatan produksi lainnya, maka seorang istri lebih berperan dalam kegiatan konsumsi, mulai dari belanja, memasak, mencuci dan sebagainya. Sedangkan anak-anak mereka hanya berperan membantu orang tua mereka, seorang anak perempuan bertugas membantu ibu di rumah, sedang anak laki-laki akan membantu ayah di sawah.

Apabila suatu somah mempunyai ikatan sosial berdasarkan persamaan keturunan dan perkawinan dengan somah-somah itu dapat dikatakan sebagai brayat atau keluarga dalam arti luas atau *extended family*. Ikatan sosial dalam keluarga luas ini dibentuk bilateral (Hildred Geertz, 1985; dan Jaya, 1969), yaitu berdasarkan garis keturunan dari pihak suami atau istri. Dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri itu, menyebabkan suatu somah menjadi

bagian dari dua keluarga (perbesanan) sekaligus. Seorang suami akan menjadi menantu dari orang tua istrinya, dan menjadi bagian dari keluarga itu. Demikian juga kedudukan istri di dalam keluarga suaminya. Sedangkan kedudukan anak dari suami-istri ini lebih kuat lagi di dalam dua keluarga perbesanan itu. Oleh karena ikatan kekeluargaan ini berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, maka keanggotaannya menjadi semakin banyak. Apalagi masih ditambah oleh adanya ikatan perkawinan, yang juga menambah jumlah keanggotaan keluarga dalam pengertian luas itu. Oleh karena banyak dan semakin banyaknya jumlah anggota dari extended family ini, maka seringkali seluruh warga dalam suatu dusun menganggap diri mereka masih mempunyai ikatan persaudaraan satu dengan yang lain. Dalam kenyataan yang sebenarnya, setiap keluarga inti (nucleus family), akan membedakan keluarga luasnya menjadi dua, yaitu keluarga dekat (sedulur cedak) dan keluarga atau saudara jauh (sedulur adoh). Yang disebut saudara dekat, bukan karena tempat tinggalnya yang berdekatan, tetapi karena dekat dalam persamaan garis darah. Mereka yang termasuk saudara dekat antara lain saudara sekandung (sedulur cer) saudara seayah lain ibu (tunggal bapa seje biyung), saudara seibu lain ayah (seje bapa tunggal biyung). Sedangkan saudara sepupu atau misanan masih dikategorikan sebagai sedulur cedak. Untuk saudara mindoan atau tunggal buyut dan saudara-saudara yang lain, dapat dikategorikan sebagai saudara jauh. Keeratan hubungan antar saudara dalam keluarga luas ini disamping karena faktor kedekatan hubungan darah, juga karena faktor yang lain misalnya kedekatan tempat tinggal dan persamaan-persamaan yang lain.

Hubungan sosial di antara anggota kelompok kekerabatan ini ditandai oleh adanya stratifikasi. Setiap anggota kelompok ini akan selalu mempunyai saudara tua (kadang kasepuhan atau sedulur tua) dan saudara muda (kadang kanoman atau sedulur anom). Yang disebut kadang kasepuhan ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan yang lebih tua (tua awune), seperti kakek nenek beserta saudara-saudaranya, ayah ibu, pakde-bude, pak lik-

bu lik, bapak ibu mertua, kakak, dan kakak ipar. Sedangkan mereka yang disebut kadang kanoman adalah saudara-saudara yang mempunyai garis darah lebih muda, misalnya adik, adik ipar, anak, keponakan, prunan (anak dari adik), dan cucu. Status kadang kasepuhan dan kadang kanoman ini semata-mata ditentukan oleh tingkatan garis darah seseorang terhadap saudaranya dan bukan berdasarkan usia seseorang jika dibandingkan dengan saudaranya itu. Sehingga seseorang yang mempunyai status garis darah lebih muda akan tetapi berumur lebih tua, akan tetap menyebut kadang kasepuhannya dengan sebutan yang sesuai.

Ikatan hubungan antar saudara dalam kelompok kekerabatan telah disosialisasikan semenjak usia anak-anak dalam setiap kesempatan bertemu. Seorang anak yang masih kecil atau anggota keluarga yang lain, biasanya akan diperkenalkan dengan saudara-saudaranya dengan pertama menyebut status kadang kasepuhan atau kadang kanomannya. Kepada kadang kasepuhannya seseorang diwajibkan untuk menaruh hormat (ngajeni) bahkan jika perlu harus menggunakan bahasa jawa halus (kromo) ketika berbicara.

Dengan demikian maka seseorang akan selalu menempatkan diri sesuai dengan status garis darahnya, apabila berhadapan dengan saudara-saudaranya dan dengan demikian akan mempermudah untuk bersikap kepada mereka.

Hubungan sosial di antara anggota kelompok kekeluargaan ini lebih bersifat informal dan melibatkan unsur-unsur emosi, karena kelompok ini tidak diorganisasikan secara formal dan tidak mempunyai kegiatan atau pertemuan yang rutin. Unsur emosi terutama disebabkan karena ikatan ini berdasarkan persamaan garis darah semata, akan tetapi terintegrasi dengan kuat. Hubungan di antara mereka cenderung lebih kuat dari pada dengan orang yang bukan keluarganya, bahkan mereka menyebut orang yang bukan anggota keluarganya sebagai wong liya (orang lain). Semakin dekat hubungan darah antara seseorang dengan saudaranya dan semakin dekat tempat tinggal mereka, maka cenderung mempunyai hubungan yang semakin akrab.

Pertemuan di antara anggota kelompok kekerabatan hanya bersifat insidental dan informal, baik dalam kunjungan tidak resmi (tilik sedulur) maupun dalam berbagai acara keluarga. Kunjungan tidak resmi atau tilik sedulur ini dilakukan dalam setiap kesempatan, terutama pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan dalam acara-acara keluarga baik dalam acara pesta perkawinan, khitanan, atau pada saat salah seorang anggota keluarga meninggal; para saudara dalam kelompok kekeluargaan ini mendapat prioritas untuk mendapat undangan maupun layatan. Dalam kesempatan semacam inilah anggota-anggota kelompok kekerabatan dapat berkumpul dan saling mempererat tali hubungan. Perkawinan di antara anggota kelompok kekerabatan terutama dengan saudara jauh, juga sering disukai. Karena dengan perkawinan itu akan semakin mempererat tali hubungan yang semakin jauh, dan perkawinan semacam ini biasa disebut sebagai ngumpulke balung pisah (mengumpulkan tulang yang berserakan).

Meskipun ikatan sosial dalam kelompok kekerabatan ini tidak diorganisasikan secara formal, akan tetapi hal ini tidak harus menyebabkan hubungan di antara mereka tidak akrab. Kuatnya ikatan sosial di antara mereka dapat dilihat dari kuatnya solidaritas yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kewajiban untuk saling membantu saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan. Suatu ungkapan masyarakat desa Jambangan yang mengisyaratkan pentingnya membantu saudaranya yang sedang kesulitan adalah “tega larane ora tega patine” (tega melihat saudaranya sakit, tetapi tidak tega melihat saudaranya meninggal). Bagi setiap orang desa, membantu saudaranya sendiri (biasa disebut nggon dhewe = punya sendiri), jauh lebih penting dari pada membantu orang lain yang bukan keluarganya (wong liya). Para saudara dekat dan saudara yang lain, akan berusaha untuk membantu semampu tenaga mereka terhadap keluarganya yang sedang membutuhkan.

2.3. Kelompok sosial keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat desa Jambangan sebelum masuknya agama Islam, lebih diwarnai oleh suatu kepercayaan asli masyarakat setempat. Kepercayaan asli itu terutama tercermin dalam kepercayaan terhadap kehidupan atau dunia supra natural, yang disebut sebagai alam gaib. Di dalam alam gaib yang tak terlihat mata itu, bersemayam berbagai macam makhluk atau roh halus. Meskipun makhluk atau roh halus itu mempunyai dunianya sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kejadian-kejadian aneh yang sering dialami oleh penduduk desa dan tidak dapat diterima oleh akal mereka, biasanya dihubung-hubungkan dengan kepercayaan pada makhluk halus itu.

Masyarakat desa ini mempercayai adanya beberapa jenis makhluk halus, baik yang dianggap baik dan jahat. Makhluk halus yang baik adalah yang membantu dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia, seperti dayang yang baurekso suatu tempat, makhluk halus yang membantu seseroang atau prewangan, dewa dewi kehidupan juga dianggap sebagai roh yang baik, seperti dewi padi Sri. Sedangkan roh jahat adalah roh atau makhluk halus yang suka menakuti manusia seperti wewe, gendruwo, dan memedi lainnya; di samping juga yang membuat manusia sakit seperti misalnya dhemit. Di samping itu masyarakat juga percaya akan keberadaan Tuhan pencipta alam semesta (Gunti kang murbeng dumadi), yang juga menciptakan manusia.

Kepercayaan asli penduduk desa ini merupakan kepercayaan masyarakat komunal, yang dikristalisasikan dari generasi ke generasi selama berabad-abad; sehingga budaya keagamaan asli ini menjadi landasan bagi kehidupan keagamaan masyarakat desa selanjutnya. Kepercayaan komunal ini terutama diwujudkan dalam berbagai upacara selamatan. Selamatan yang punya tujuan selamat atau tanpa halangan apapun, adalah merupakan suatu permohonan kepada Tuhan pencipta alam semesta, roh-roh halus yang baik, dan nenek moyang yang bersemayam di alam abadi (alam kelanggengan) agar ikut membantu manusia dalam melaksanakan keinginannya. Selamatan juga bertujuan untuk menolak gangguan roh

jahat yang dapat membuat manusia gagal menempuh keinginannya. Seringkali juga disediakan berbagai macam sesajen, yang dipersembahkan kepada roh-roh halus yang baik atau arwah nenek moyang mereka.

Kepercayaan asli masyarakat kemudian secara perlahan-lahan berubah semenjak masuknya pengaruh dan ajaran agama Islam. Sejarah perkembangan Islam di desa Jambangan khususnya dan masyarakat kecamatan Paron umumnya dimulai semenjak kedatangan kyai dari Surakarta, kira-kira pada awal abad ke-19. Kyai tersebut menurut keterangan penduduk, adalah merupakan salah seorang keturunan keraton Solo (Surakarta) dan masih keturunan saudara muda Sultan Agung Raja Mataram. Salah seorang keturunan kyai tersebut ada yang menetap di Kecamatan Paron dan menyebarkan ajaran Islam ke Wilayah sekitarnya. Kyai yang dilahirkan di kalangan keluarga santri itu, setelah memperoleh pendidikan yang dianggap cukup maka kemudian diberi tugas untuk menyebarkan agama. Dalam rangka penyebaran agama Islam itu kemudian kyai memilih tinggal di kecamatan Paron, kedatangan kyai disambut dengan baik. Beliau diberi tanah pekarangan dan sawah desa, untuk keperluan hidup dan penyebaran agama Islam.

Sejak saat itulah penyebaran agama Islam di seluruh kecamatan Paron bermula. Upaya yang ditempuh kyai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah dengan membina kerja sama dengan para Lurah (Kepala Desa). Kerja sama di antara mereka telah memungkinkan kyai memperoleh pengikut atau murid pertama dari beberapa kebayan (kepala dusun) yang berada di wilayah kekuasaan lurah. Secara rutin para kebayan ini mengikuti pelajaran atau pengajian yang diberikan oleh kyai yang bertempat mula-mula di rumah kyai.

Pada tahap berikutnya, para murid kyai tidak terbatas hanya pada para kebayan saja, tetapi juga masyarakat desa di sekitar dan didalam dusun. Oleh karena para murid kyai semakin lama semakin banyak, maka kemudian mereka membangun sebuah masjid. Masjid yang didirikan di depan rumah kyai itu adalah merupakan masjid tertua yang dibangun di

kecamatan Paron . Masjid inilah yang kemudian dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran agama Islam, yang kemudian sedikit demi sedikit ajaran Islam ini mempengaruhi nilai budaya dan kepercayaan masyarakat desa Jambangan dan sekitarnya.

Setelah kyai pertama meninggal, maka kedudukannya diganti oleh anaknya, Tidak banyak cerita yang dapat diperoleh tentang kyai tersebut , tetapi ada yang menjadi penerus . Kyai penguat ini kemudian mempunyai putera yang oleh ayahnya dikirim ke pesantren di Solo untuk belajar agama atau nyantri. Setelah selesai belajar di Solo ini membantu ayahandanya di Jambangan , dan setelah sang ayah meninggal maka kedudukan beralih ke tangan si anak Setelah menjadi pimpinan atau kyai di desa Jambangan juga masih terus belajar agama bersama-sama kyai-kyai lainnya di berbagai pesantren .

Kyai ini kemudian mempunyai beberapa anak dari dua perkawinannya. Dari perkawinan pertamanya mendapatkan seorang putera yang sampai sekarang masih aktif sebagai kyai. Sedang dari perkawinan kedua, beliau memperoleh seorang putera lagi yang juga masih aktif sebagai kyai. Kedua kyai putra dari kyai inilah yang sampai sekarang menjadi tokoh-tokoh agama, yaitu kyai putra dari hasil perkawinan pertama dan kyai putra dari perkawinan kedua..

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa masuknya pengaruh agama Islam dalam masyarakat desa Jambangan yang nota bene merupakan agama yang datang dari luar, dalam praktek penyebarannya akan berhadapan dengan nilai budaya dan kepercayaan asli masyarakat setempat. Penyebaran agama-agama dari “luar” itu pada mulanya dilakukan dengan jalan damai yang kompromis, karena bagaimanapun para penyebar agama-agama itu mempunyai kedudukan yang terlalu lemah dalam menghadapi tatanan masyarakat dan kepercayaan yang telah mengakar selama berabad-abad. Seringkali dikatakan bahwa para penganut agama Islam yang “murni” berupaya untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Sedangkan mereka yang tetap memegang teguh nilai budaya keagamaan Jawa akan berupaya

menjawabkan agama-agama itu. Sebagai hasilnya adalah terjadinya tarik menarik dua kutub budaya keagamaan dalam masyarakat desa Jambangan , yang tetap menjadi persoalan dalam masyarakat hingga saat ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang dianut bersama dalam suatu agama sangat penting dalam pembentukan integrasi para anggotanya. Secara tradisional agama memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum, yang karenanya sistem nilai dalam masyarakat memperoleh nilai yang mutlak. Dengan kata lain, pandangan dunia (world view) yang mendasar dalam masyarakat berkaitan dengan struktur agamanya. Pandangan dunia ini merupakan kerangka umum bagi orientasi kognitif yang pokok dalam sistem simbol ekspresif yang dianut bersama dalam masyarakat (kepercayaan-kepercayaan dasar serta sentimen) dibentuk secara khas oleh warisan agama. Kesadaran kolektif sebagaimana dikatakan Durkheim, disebabkan karena adanya seperangkat ide, kepercayaan, nilai dan pola normatif kelompok sosial. Kelompok sosial keagamaan mengungkapkannya dalam bentuk yang simbolis, dan lebih penting lagi dalam ritus-ritus agama yang mempertegas dan memperkuat ikatan emosional para anggota dalam masyarakat di mana kenyataan masyarakat itu bersandar .

Pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai kelompok sosial keagamaan seperti dalam kasus desa Jambangan ini, menunjukkan bahwa di dalam tiap kelompok mempunyai anggota-anggota yang terintegrasi dalam ikatan sosial yang kuat. Tiap kelompok sosial mempunyai pandangan hidup dan aktifitas sosial keagamaan yang berbeda dengan yang lain. Dalam pengelompokan sosial berdasarkan persamaan budaya keagamaan melibatkan seluruh masyarakat desa Jambangan ke dalam 3 kelompok sosial keagamaan yang ada. Ikatan sosial di dalam tiap kelompok dibangun dari suatu pandangan hidup yang sama dan cenderung memandang kelompoknya sebagai yang terbaik dan benar, dan karena aktifitas-aktifitas bersama mereka yang rutin. Perasaan superioritas kelompok dan anggapan bahwa pandangan

mereka yang paling benar, menyebabkan muncul kecenderungan terjadinya konflik antar kelompok.

3. Pergeseran peran tokoh masyarakat di pedesaan

Pergeseran peranan tokoh masyarakat tradisional oleh tokoh masyarakat baru yang lebih modern, berjalan dengan sangat lambat. Hal itu juga menunjukkan bahwa perubahan-perubahan struktur dan budaya masyarakat tersebut berjalan sangat lambat.

Dalam pergeseran ini dapat ditunjukkan munculnya tokoh masyarakat baru yang modern dan tidak tergantung pada sumber daya pedesaan yang penting yaitu tanah pertanian, tetapi tergantung pada gaji yang mereka peroleh di mana mereka bekerja disektor non-pertanian. Sebagaimana dikatakan Marx, bahwa kelas-kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya pemupukan surplus produksi, sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap rakyat/massa produksinya. Menurut Marx, kelas-kelas terbentuk melalui hubungan antar pengelompokan individu dengan pemilikan pribadi di atas sarana-sarana produksi. Hal itu menghasilkan suatu model hubungan antara kelas yang dominan dan yang satunya lagi dibawahinya .

Munculnya kelas kapitalis pedesaan dihambat oleh ketiadaan semangat kapitalisme dan kebutuhan konsumtif para pemilik sawah yang tidak memungkinkan mereka menginvestasikan surplus produksi pertaniannya ke dalam sektor pertanian maupun non pertanian.

Meskipun sebenarnya juga muncul beberapa pengusaha baru pedesaan, akan tetapi jumlah mereka terlalu sedikit dan alat produksi mereka tidak terlalu banyak dan menentukan kehidupan seluruh masyarakat. yang disebut orang kaya dalam masyarakat pedesaan saat ini terdiri dari mereka yang memiliki tanah luas, aparat, pengusaha baru pedesaan, dan para elite baru pedesaan. Dengan demikian tokoh ekonomi pedesaan sekarang semakin

terdeferensiasi, sesuai dengan sumber dayanya masing-masing dan cenderung semakin mengurangi peranan tanah pertanian sebagai sumber daya utama pedesaan.

Di samping itu rakyat pedesaan yang lebih miskin juga semakin terdeferensiasi dalam mata pencaharian. Banyak penduduk desa yang miskin, bekerja di luar sektor pertanian (sebagai upaya mengatasi keterbatasan pekerjaan sektor pertanian dan rendahnya upah buruh tani), seperti menjadi pedagang, dalam industri rumah tangga, berbagai sektor jasa, dan berbagai pekerjaan marginal lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara tokoh ekonomi dengan rakyat pedesaan yang miskin, cenderung semakin tidak menunjukkan hubungan memeras dan diperas.

Sikap dan Perilaku Rakyat pedesaan dipengaruhi faktor situasi dan lingkungan. Jika munculnya elite pedesaan diartikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi (masyarakat) yang dengan seluruh atau sebagian anggota masyarakat tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki pimpinan masyarakat pedesaan masyarakat itu sendiri berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau pengabsahan penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain pemilihan tokoh masyarakat merupakan partisipasi individu yang memiliki otoritas absah (legitimacy authority). Konsekwensinya bahwa munculnya elite pedesaan tersebut akan menciptakan suasana psikopolitis tertentu pada setiap orang yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena munculnya tokoh menuntut pengorbanan energi, waktu dan adanya tuntutan bagi rakyat sendiri untuk mengambil suatu keputusan. Memutuskan pilihan dalam menentukan tokoh juga bisa merupakan ekspresi dari rasa keterhubungan seseorang dengan suatu masyarakat tertentu dan dituntut kesadaran akan sekitarnya..

Pengertian tokoh, menunjuk kepada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan paling tinggi. Dalam arti yang lebih khusus adalah sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya segolongan kecil yang memegang

kekuasaan itu diambil. Sedangkan dalam pemakaiannya, tokoh adalah posisi dalam masyarakat, dipuncak struktur-struktur sosial yang terpenting. yaitu bidang ekonomi, pemerintahan, kemiliteran,kepolitikan, agama, pengajaran dan pekerjaan bebas lainnya.

Dengan berjalannya proses posisi tersebut tokoh semakin banyak dan semakin beragam. Tetapi pertumbuhan tokoh tersebut tidak selalu menyebabkan mereka berada dalam arus proses sosial. Golongan ini justru tumbuh sebagai lapisan tersendiri dalam masyarakat, karena mereka memiliki kekuasaan, dengan demikian elite memperoleh kedudukan yang semakin menentukan. Semakin banyak sumber kekuasaan yang dimilikinya semakin terjamin kelangsungan kedudukan kekuasaannya. Kaitannya dengan legitimasi rakyat, bahwa pada masyarakat ketat cenderung untuk lebih bersifat monopolistik, mutlak dan manipulatif dan pada masyarakat longgar lebih mendasar pada kesepakatan nilai-nilai tradisional. Tetapi sulit untuk melihat prinsip-prinsip tersebut di dalam masyarakat longgar yang tidak menumbuhkan kehendak bersama. Kesepakatan hanya berada pada tingkat-tingkat pemegang kekuasaan, pada struktur-struktur kekuasaan.

Pemilikan sumber daya yang kuat dan besar, merupakan dasar penting dari kekuasaan. Sumber daya ekonomi akan mengendalikan perekonomian. Sumber daya politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Sumber daya militer akan dapat menguasai kekuasaan dan sumber daya ideologi akan dapat mengendalikan sistem kepercayaan. Keinginan berkuasa akan mendorong untuk bekerjasama diantara penguasa bidang-bidang tersebut. Dalam hal ini, Battomore mengingatkan bahwa bukan tidak mungkin untuk mengidentifikasikan berbagai tokoh sebagai kelompok-kelompok yang mempunyai status yang tinggi dalam suatu masyarakat. Mereka terdiri atas semua kelompok yang melaksanakan kekuasaan politik langsung dan tidak langsung turut dalam perjuangan politik untuk kepemimpinan politik.

Pengembangan sektor pertanian, dilakukan dalam upaya pengembangan budidaya padi di sawah yang sebelumnya lebih bersifat tradisional menjadi pertanian “modern” yang lebih produktif. Modernisasi pertanian yang terutama ditujukan untuk memenuhi sasaran swasembada beras itu diupayakan dalam suatu bentuk revolusi hijau, yaitu pengelolaan secara intensif dan modern dalam usaha pertanian. Kepada para petani diperkenalkan Panca birokratisasi, dan program listrik masuk desa. Pemerintah membangun jalan beraspal, yang memungkinkan masyarakat desa dapat berhubungan dengan masyarakat perkotaan. Birokratisasi yang dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan pembangunan masyarakat desa juga dilakukan dengan memperbaiki tata organisasi dan administrasi desa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa, dibangun satu Pusat Kesehatan Masyarakat dan satu Puskesmas pembantu pada tingkat kecamatan, dan tiga Pos Pelayanan Terpadu di desa, dan Pendidikan dibangun SD Inpres..

Sedangkan upaya untuk mengembangkan pelayanan umum, diwujudkan antara lain dalam bentuk pengembangan prasarana dan sarana transportasi, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, penggarapan tanah, dan proses produksi pertanian. Oleh karena sebagian besar penduduk (70,16%) desa Jambangan mempunyai pekerjaan pokok di sektor pertanian, maka faktor tanah sebagai sumber daya, masih memegang peranan penting dalam kehidupan mereka. Sejalan dengan itu, maka kepemilikan tanah dapat menentukan setiap orang atau setiap keluarga dalam memperoleh pendapatan.

Gambaran Masyarakat Desa Jambangan menunjukkan bahwa petani besar dan menengah yang meliputi 16,04% rumah tangga, memiliki lebih dari setengah (51,97%) tanah pertanian yang ada. Sedangkan 23,17% rumah tangga lainnya sama sekali tidak memiliki tanah pertanian. Terdapat hampir setengah (43,90%) yang dikategorikan sebagai petani gurem atau rumah tangga yang memiliki tanah antara 0,01-0,24 ha, dan hanya memiliki tanah 27,89%. Sedangkan petani kecil yang meliputi 16,89% rumah tangga, memiliki 16,08%

tanah pertanian. Apabila kita gunakan indeks Gini sebagai pengukur tingkat kesenjangan pemilikan tanah, maka diperoleh hasil 0,53. Dengan angka indeks Gini itu berarti ketidakmerataan distribusi pemilikan tanah pertanian di desa Jambangan bersifat cukup serius.

Meskipun faktor pemilikan tanah pertanian dapat menentukan tingkat pendapatan petani, akan tetapi secara lebih nyata faktor penguasaan tanah lebih berpengaruh. Dalam hal ini dimungkinkan terjadinya penguasaan tanah seorang petani, atas tanah milik petani lain melalui penyakapan, penyewaan, dan penggadaian. Para petani pemilik, karena tidak menguasai tanah miliknya, tidak secara aktif memanfaatkan tanah tersebut dalam produksi pertanian. Dengan demikian maka sebagian rumah tangga yang tidak memiliki tanah pertanian, mempunyai kemungkinan untuk menguasai tanah orang lain. Atau sebaliknya, ada kemungkinan seorang pemilik sama sekali tidak menguasai tanah miliknya.

Dalam kasus masyarakat desa Jambangan ini terdapat beberapa tanah yang oleh para pemiliknya disakapkan kepada orang lain. Ada beberapa alasan mengapa tanah pertanian tersebut disakapkan, antara lain karena tanah tersebut terletak jauh dari rumah pemilik sehingga terlalu sulit untuk digarapnya sendiri, juga karena si pemilik mempunyai pekerjaan pokok di luar sektor pertanian maka tidak mempunyai pekerjaan pokok di luar sektor pertanian hingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap tanahnya sendiri, disamping alasan-alasan lain. Rumah tangga yang menyakapkan tanah miliknya itu terutama dari golongan petani besar, dan juga dari petani yang lain. Penyakapan dengan sistem bagi hasil maro dan morotelu dalam masyarakat desa Jambangan ini terutama mempunyai nilai guna untuk lebih pemeratakan tingkat pendapatan petani, atas pemilikan tanah yang tidak terdistribusi secara merata.

Jumlah keseluruhan sawah yang oleh para pemiliknya disakapkan kepada orang lain itu adalah meliputi 35,79 hektar atau 11,80 persen dari keseluruhan sawah hak milik rumah tangga di Jambangan . Prosentase ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan temuan

Gunawan Wiradi dan Makali (1982), dari desa-desa yang ditelitinya, proporsi luas sawah yang disakapkan kepada petani lain berkisar antara 17-86 % dari seluruh areal tanah milik pribadi yang ada. Ada kecenderungan yang cukup kuat dari para petani pemilik untuk menguasai dan menggarap sendiri tanah-tanah miliknya, karena dengan demikian mereka dapat memperoleh hasil sepenuhnya dari sawah itu.

Para penyakap terutama berasal dari golongan petani gurem yang meliputi 52 orang atau 50,98%, kemudian petani tak bertanah yang meliputi 34 rumah tangga (33,33%), kemudian disusul oleh 13 rumah tangga (12,75%) petani kecil, dan 3 rumah tangga (2,94%) petani menengah. Adapun alasan para petani pemilik memilih para penyakap itu adalah terutama karena mereka dianggap teman atau dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mengerjakan tanah dengan baik. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam penyakapan ini menggunakan sistem maro yang meliputi 27,33 hektar (76,36%) dan sistem morotelu yang meliputi 8,46% (23,64%). Dari temuan itu menunjukkan bahwa para petani pemilik lebih suka menyakapkan tanahnya dengan sistem morotelu, hal tersebut disebabkan karena dalam sistem morotelu para pemilik memperoleh dua pertiga bagian hasil, meskipun mereka berkewajiban menyediakan saprodinya. Sedangkan dalam sistem maro para pemilik hanya memperoleh setengah bagian hasil, dan mereka tidak perlu menanggung biaya saprodi dan tenaga kerja, karena seluruh ongkos penggarapan ditanggung penggarap. Di beberapa dusun bahkan telah berkembang sistem borg dalam penyakapan maro, yang dimaksudkan borg disini suatu bentuk pinjaman (terutama emas) kepada penyakap agar mereka dapat menggarap sawah dengan sistem bagi hasil maro yang cukup menguntungkan pihak penyakap itu.

Dari beberapa fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penyakapan tanah mulai banyak ditinggalkan, karena dengan menggarap sendiri tanah miliknya mereka dapat menarik keuntungan yang maksimal. Kesimpulan itu didukung oleh kenyataan bahwa prosentase

tanah yang disakapkan kepada petani lain sangat sedikit dan ada sebagian pemilik yang merasa terpaksa menyakapkan karena tidak dapat menggarap sawahnya yang letaknya jauh atau mereka tidak dapat mengerjakannya sendiri karena tidak mempunyai waktu yang cukup. Semakin banyaknya petani pemilik menerapkan sistem morotelu dan borg, juga menunjukkan bahwa para pemilik semakin meninggalkan sistem maro yang dulu lebih banyak digunakan dan lebih menguntungkan para penyakap. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa hubungan patron-client yang terutama berlandaskan hubungan antara pemilik tanah dan para penyakapnya, cenderung semakin memudar.

Aspek lain yang menyebabkan beralihnya penguasaan tanah dari pemilik kepada orang lain adalah karena penggadaian. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang melarang gadai-menggadai ini, ternyata dalam kasus desa Jambangan ini masih cukup banyak tanah yang digadaikan dalam istilah mereka disebut dengan di jual tahunan. Sistem gadai yang berlaku dalam masyarakat ini adalah si pemilik tanah minta pinjaman uang kepada orang lain dalam jumlah tertentu, kemudian memberi pinjaman uang berhak menggarap sawah pemilik dan memungut seluruh hasilnya. Hak pengarapan akan berakhir apabila si pemilik telah mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Dari hasil wawancara, ditunjukkan adanya 30 rumah tangga yang menggadaikan tanah miliknya kepada 25 rumah tangga petani lainnya. Jumlah rumah tangga terbesar yang menggadaikan tanah miliknya adalah dari golongan petani menengah yang meliputi 13 rumah tangga (43,33%), kemudian disusul petani gurem yang meliputi 8 rumah tangga (26,67%), petani kecil yang menggadaikan sawahnya ada 7 rumah tangga (23,33%), dan petani besar ada 2 rumah tangga (6,67%). Sedangkan 25 rumah tangga yang menggadai terdiri dari 11 rumah tangga (44%) berasal dari golongan petani menengah, 5 rumah tangga dari golongan petani kaya (20%), 4 orang petani kecil (16%), dan masing-masing dua petani berasal dari golongan tuna kisma dan petani gurem (8% dan 8%).

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kecenderungan yang kuat terjadinya pemusatan penguasaan tanah di tangan petani luas melalui sistem gadai menggadai. Sebagian besar petani yang menggadaikan tanah adalah petani menengah dan bahkan ada dua rumah tangga petani besar yang menggadaikan tanah miliknya. Demikian juga para penggadai yang sebagian besar juga berasal dari golongan menengah, juga memperkuat kesimpulan.

Cara lain yang dapat dipergunakan untuk melihat terjadinya proses polarisasi ekonomi adalah dengan melihat catatan jual-beli tanah dari tahun ke tahun. Transaksi jual-beli tanah khususnya sawah, menyebabkan terjadinya pengalihan hak milik atas sawah dari penjual kepada pembeli. Dalam masyarakat desa Jambangan ini dikenal apa yang disebut sebagai *adol plas pati bogor*, yaitu penjualan tanah secara permanen artinya tidak dapat ditebus lagi seperti halnya *adol ungsuman*. Terjadinya transaksi jual-beli sawah antar rumah tangga petani di desa Jambangan.

Petani menengah merupakan golongan petani yang paling banyak menjual tanah milik, yaitu meliputi 39,48 % transaksi, kemudian disusul oleh golongan petani kecil yang meliputi 31,58 %, petani gurem yang meliputi 18,42 %, dan terakhir petani besar yang meliputi 5,26 %, sedangkan sisanya (5,26 %) tidak diketahui identitasnya karena tinggal di luar desa Jambangan. Sedangkan golongan petani yang paling banyak membeli sawah adalah juga dari golongan petani menengah, yang meliputi 44,74 %, kemudian disusul petani kecil yang meliputi 21,05 %, petani gurem menempati urutan berikutnya dengan 13,16 % transaksi pembelian, sedangkan petani kaya yang sebenarnya mempunyai kesempatan besar hanya meliputi 10,53 %, kemudian terdapat 7,69 % *tuna kisma* yang membeli sawah, sedangkan 2,63% sisanya tidak diketahui asal golongan luas pemilikan sawahnya.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kecenderungan yang nyata tentang pemusatan pemilikan tanah melalui kasus-kasus jual beli tanah, ke tangan para petani besar.

Pengalihan penguasaan tanah dari pemilik sawah kepada petani lain juga dapat terjadi karena adanya sewa-menyewa. Dalam masyarakat desa Jambangan dikenal dengan adol ungsuman (jual musiman), yaitu menyewakan tanah pertanian kepada petani lain dalam jangka waktu tertentu. Para penyewa biasanya membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah untuk beberapa petak tanah, kemudian mereka memanfaatkan sawah tersebut selama jangka waktu tertentu., oleh karena jangka waktu penyewaan sangat terbatas (biasanya hanya satu musim tanam, atau antara 4-6 bulan). Menurut beberapa keterangan seluruh luas sawah yang sering disewakan, tidak lebih dari 5 % dari seluruh areal sawah yang ada. Golongan petani yang menyewakan tanah juga sangat beragam, artinya tidak terbatas pada satu atau dua golongan petani saja. Akan tetapi para penyewa terutama adalah mereka yang merupakan pengusaha disektor pertanian (agribisnis).

Terdapat 9 orang yang sering menyewa tanah milik petani lain, guna ditanami berbagai tanaman yang cukup menguntungkan dan padat modal, meskipun juga beresiko tinggi. Berbagai jenis tanaman tersebut antara lain, melon, semangka, tomat, kacang panjang, lombok, dan beberapa lainnya yang kesemuanya merupakan jenis baru yang katanya berasal dari Taiwan. Cara pemeliharaan tanam-tanaman baru ini cukup intensif dan membutuhkan banyak (jenis dan jumlah) obat-obatan dan pupuk, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang banyak. Jika dilihat dari latar belakang para “petani baru” ini, maka 2 orang merupakan petani besar, 5 orang petani menengah, dan 2 orang lainnya berasal dari golongan petani kecil. Dari kenyataan ini juga dapat disimpulkan bahwa pemusatan penguasaan tanah melalui sewa menyewa tidak ditangan petani besar, tetapi ditangan petani menengah.

Para petani “baru” ini yang barangkali merupakan kapitalis-kapitalis pedesaan baru, yang menandai perkembangan masyarakat desa Jambangan yang semakin kapitalistis. Dengan mengingat jumlah mereka yang masih sedikit dan skala kegiatan ekonomi mereka masih kecil, maka dapat dikatakan pengaruh mereka terhadap kehidupan masyarakat desa Jambangan secara keseluruhan. Meskipun ada kemungkinan jumlah petani “baru” dan skala kegiatan ekonomi mereka semakin meningkat di masa mendatang, akan tetapi jika dilihat dari tingkat keberhasilan kegiatan pertanian baru mereka yang belum cukup memuaskan pada beberapa waktu yang lalu, maka perkembangan itu belum dapat berjalan mulus.

Penguasaan tanah pertanian sebagai faktor yang menentukan pendapatan setiap rumah tangga, menunjukkan bahwa 15,2% rumah tangga petani golongan besar dan menengah menguasai 48,84% areal sawah yang ada. Terdapat 42,12% rumah tangga petani golongan petani gurem yang hanya menguasai 23,76% sawah yang ada. Sedangkan petani kecil yang meliputi 22,70% rumah tangga, menguasai 23,76% sawah. Dan rumah tangga yang tidak menguasai sawah sama sekali (tuna kisma mutlak) meliputi 19,98%. Jika kita gunakan indeks Gini sebagai pengukur kesenjangan distribusi penguasaan tanah pertanian, maka kita dapatkan angka 0,50%. Jika kita bandingkan dengan angka indeks Gini dalam distribusi pemilikan tanah, kita dapatkan selisih angka 0,03% lebih rendah, hal itu terjadi terutama karena adanya penyakapan tanah-tanah milik petani kaya dan menengah, yang melibatkan 13,76% petani tak bertanah dan 11,11% petani gurem.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa Jambangan juga dalam hubungan kerja pertanian, antara lain dalam pemanenan dan pengolahan hasil pertanian. Memudarnya hubungan kerja pertanian antara petani pemilik dengan para buruh tani juga terjadi ketika muncul beberapa kasus penebasan. Ikatan hubungan antara dua golongan petani itu semakin memudar karena dengan penebasan para buruh tani yang sebelumnya diperlukan oleh para

pemilik untuk memanen padi, kemudian digantikan oleh pemanen luar desa/dusun yang dibawa sendiri oleh para penebas.

Munculnya kecenderungan itu menyebabkan para buruh tani semakin kehilangan pekerjaan, dan berarti juga semakin berkurangnya pendapatan yang dapat mereka peroleh dari sektor pertanian. Dari beberapa wawancara dapat diperkirakan bahwa sekitar 5 sampai 7 persen lahan pertanian rata-rata tiap tahun ditebaskan. Meskipun areal sawah yang ditebaskan belum begitu luas, akan tetapi akibat yang ditimbulkannya bagi para buruh tani cukup serius.

Pendapatan petani juga semakin mengecil ketika para petani pemilik di beberapa dusun meminta bagian yang lebih besar dalam bawon, atau pembagian bagian padi dalam upah pemanenan. Ada beberapa dusun yang mulai mengurangi bagian bawon para penderep (pemanen), dari seper delapan menjadi seper sembilan bagian. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat desa Jambangan telah terjadi proses evolusi dalam hubungan kerja antara petani pemilik dengan buruh tani, di mana para petani pemilik semakin menuntut bagian bawon yang semakin banyak, sehingga pendapatan buruh tani semakin mengecil.

Munculnya beberapa penggilingan padi, juga semakin mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan para buruh tani. Dalam masyarakat desa Jambangan sebelum munculnya mesin giling padi, dikenal dua cara untuk prosesing dari padi menjadi gabah, yaitu nutu dan nosoh. Nutu adalah proses mengelupas kulit padi dengan menggunakan alu dan lumpang. Para buruh tani dalam kegiatan nutu ini memperoleh satu per enam belas bagian beras yang ditutunya, disamping juga setengah dedak yang dihasilkan. Sedangkan kegiatan nosoh, ditujukan untuk memutihkan beras tuton yang kurang bersih. Para buruh tani mendapat satu per tiga puluh dua bagian beras hasil sosohnya, disamping setengah bagian bekatul. Dengan tersedianya tiga penggilingan padi yang ada di desa Jambangan saat ini, maka

prosesing nutu dan nosoh sudah hampir hilang sama sekali. Karena para pemilik lebih suka menggunakan mesin giling dianggap lebih murah dan lebih bersih maka buruh tani tidak lagi diperlukan.

Penggunaan masukan-masukan modern dalam pengolahan padi di sawah, seperti pupuk buatan dan berbagai obat-obatan, juga semakin mempersempit kesempatan kerja di sektor pertanian. Ketika pupuk buatan belum begitu banyak dipergunakan oleh pemilik sawah, para buruh tani diperlukan untuk mengangkut pupuk kandang, tetapi kemudian hilang ketika pupuk buatan hampir memonopoli kebutuhan akan pupuk. Demikian juga pekerjaan para wanita ngirik, atau menjaring berbagai hama padi dengan alat tradisional irik, menjadi hilang ketika para petani memanfaatkan peptisida.

Dari beberapa fakta tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, dan juga hubungan dalam produksi pertanian; menunjukkan bahwa dalam masyarakat desa Jambangan terstratifikasi dalam beberapa kelas berdasar pemilikan dan penguasaan sawah, dan juga terjadi kecenderungan polarisasi ekonomi sebagai akibat revolusi hijau. Penguasaan tanah pertanian (sawah) bagi rumah tangga di desa Jambangan yang sebagian besar penduduknya masih menggantungkan diri di sektor pertanian, merupakan faktor penentu tingkat pendapatan mereka. Para petani kayalah yang terutama memperoleh keuntungan dari kebijaksanaan revolusi hijau, karena dengan memanfaatkan masukan-masukan modern mereka dapat meningkatkan produksi sawah.

Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa semakin luas tanah pertanian yang dikuasai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi tingkat pendapatannya. Sejalan dengan itu, maka sebenarnya para petani bertanah lebih dari 1 hektar mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menanamkan investasi baru baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Akan tetapi dari beberapa kasus jual beli dan penggadaian tanah, kecenderungan itu kurang tampak. Para pengusaha baru di sektor pertanian, juga tidak berasal dari petani kaya tersebut.

Untuk dapat menjelaskan dua kenyataan yang “berlawanan” tersebut, ada dugaan kuat bahwa surplus yang diperoleh para pemilik tanah terutama dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan konsumtif. Berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga petani, baik yang “lama” maupun yang “baru”, menyebabkan terserapnya surplus dari sektor pertanian. Kebutuhan “lama” yang digunakan untuk berbagai kerukunan sosial seperti sumbangan kepada tetangga, saudara, atau kenalan yang sedang mempunyai hajad (kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, dan sebagainya), atau apabila rumah tangga sendiri yang punya hajad. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan baru adalah kebutuhan yang muncul bersamaan dengan proses modernisasi pedesaan, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, kesehatan, listrik, hiburan, dan sebagainya. Para pemilik tanah (terutama golongan petani besar), pada umumnya yang juga lebih banyak memanfaatkan berbagai fasilitas kehidupan yang tersedia. Demikian juga ekspansi produk-produk modern, seperti radio, televisi, sepeda motor, mobil, sabun, rokok dan sebagainya yang masuk di wilayah pedesaan; terutama dikonsumsi oleh rumah tangga yang tergolong mampu.

Dari berbagai kasus penyewaan, penggadaian, dan penjualan tanah yang terjadi di desa Jambangan, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga yang melakukan hal itu menggunakan hasilnya untuk keperluan konsumtif. Dari hasil wawancara bahwa kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh rumah tangga petani golongan besar, adalah biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka sebenarnya juga sangat mengharapkan anak-anaknya untuk dapat bekerja di luar sektor pertanian, karena mereka menganggap bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak dapat memberikan masa depan yang baik, baik jika dilihat segi pendapatan maupun gengsi sosial.

Adalah merupakan suatu kebanggaan yang besar bagi orang tua, apabila berhasil menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang tinggi, lalu kemudian bekerja di kota.

Melalui cara semacam itulah seorang anak diharapkan mikul duwur mendem jero, atau mengangkat harkat dan martabat orang tua.

Nilai keberhasilan orang tua dan anak, juga sangat ditentukan oleh keberhasilan tersebut, sehingga mereka sering dijadikan teladan bagi rumah tangga yang lain. Oleh karena untuk mencapai tujuan itu memerlukan biaya yang besar, maka orang tua yang mampu tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang besar. Bagi orang tua semacam itu, pendidikan dan pekerjaan anak-anak yang modern, jauh lebih berharga dari pada kekayaan (sawah) yang dapat mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Maka dengan kata lain pengeluaran untuk biaya sekolah anak-anak, adalah merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang.

Perkembangan Tokoh masyarakat baru dalam masyarakat desa Jambangan , juga sangat berkaitan dengan peningkatan taraf pendidikan penduduk dan juga adanya perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Dengan adanya perkembangan fasilitas pendidikan, kesadaran orang tua akan pendidikan untuk anak-anak, yang juga didukung oleh perkembangan sarana dan prasarana transportasi; maka semakin banyak anak-anak desa Jambangan yang bersekolah hingga di kota-kota. Dengan adanya peningkatan taraf pendidikan masyarakat, berarti juga terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Oleh karena proses pendidikan memerlukan biaya, maka tingkat pendidikan anak-anak desa Jambangan sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung yang dimiliki orang tua mereka, terutama sawah.

Dari catatan dalam monografi desa Jambangan 16 orang yang tamat dari perguruan tinggi dan yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan mereka inilah yang merupakan tokoh masyarakat pendidikan.

Seiring dengan proses pembangunan, maka juga berkembang kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Menurut Soentoro (1984:203), ada berbagai dugaan terjadinya

peningkatan kesempatan kerja non pertanian. Pertama, tenaga kerja tersebut terlempar dari sektor pertanian karena jenuhnya penyerapan kerja di sektor pertanian. Dugaan kedua, mereka ditarik oleh terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dengan pendapatan yang lebih baik. Dan terakhir, di pedesaan telah terjadi pergeseran nilai yang memandang rendah pekerjaan buruh tani, terutama di kalangan generasi muda yang enggan bekerja di sektor pertanian.

Pekerjaan sektor non pertanian bagi masyarakat desa Jambangan juga cukup penting, karena 29,84 % penduduknya bekerja di dalamnya. Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bekerja di sektor informal dan formal. Pekerjaan di sektor informal seperti perdagangan, jasa pertukangan, industri rumah tangga, dan lainnya; pada umumnya tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal, seperti menjadi pegawai negeri atau swasta, sangat memerlukan ijazah dari sekolah-sekolah. Dengan demikian maka tingkat pendidikan sangat menentukan jenis pekerjaan seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk bekerja di sektor-sektor formal.

Mereka yang bekerja di sektor informal meliputi 536 orang, sedangkan yang bekerja di sektor formal ada 25 orang. Para penduduk yang bekerja di berbagai bentuk sektor informal sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan rendah dan berasal dari golongan petani menengah ke bawah. Pada umumnya pekerjaan-pekerjaan ini juga memberikan hasil yang rendah. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor formal, seperti menjadi pegawai swasta dan pegawai negeri, relatif mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, berasal dari golongan petani menengah ke atas, dan pada umumnya berpendapatan lebih tinggi. Karena latar belakang pendidikan mereka yang relatif cukup tinggi, bekerja di sektor formal yang cukup modern, dan mempunyai hubungan dengan dunia luar yang lebih banyak, maka para pekerja di sektor formal ini dapat disebut sebagai tokoh masyarakat baru di pedesaan.

Berbeda dengan tokoh masyarakat lama yang bersifat polimorfik, maka para Tokoh masyarakat baru ini lebih bersifat monomorfik, karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka yang cukup beragam, sehingga mereka mempunyai keahlian yang beragam juga. Di antara mereka ada yang menjadi guru, pegawai pemerintah, anggota ABRI, pegawai swasta, dan lainnya.

Pergeseran dari Tokoh masyarakat lama menuju Tokoh masyarakat baru ini, adalah seiring dengan pergeseran kebutuhan dan pandangan masyarakat yang cenderung semakin modern. Status tokoh masyarakat baru yang diduduki terutama oleh para keturunan pemilik lahan itu diperoleh tidak semata-mata karena warisan dari orang tuanya, akan tetapi juga melalui suatu proses yang cukup panjang. Berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya, maka para tokoh masyarakat baru ini mempunyai mobilitas yang lebih tinggi dan mempunyai hubungan lebih banyak dengan dunia luar desa. Mereka juga lebih dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan perubahan, sehingga mereka juga berada di garis depan dalam menerima informasi dan nilai-nilai baru yang datang dari luar desa.

Arus nilai baru yang diserap dari pusat-pusat perubahan itu oleh para Tokoh masyarakat baru akan dibawa dan disebarkan dalam masyarakat desa. Di dalam posisi mereka sebagai mata rantai penghubung antara masyarakat perkotaan yang relatif lebih modern dan masyarakat pedesaan yang relatif lebih tradisional, maka kedudukannya sangat memungkinkannya sebagai agent of change yang sangat diperlukan untuk pembangunan pedesaan.

Di sisi yang lain kesetiaan mereka juga sangat mendua, di satu sisi mereka terikat dengan masyarakat desanya, sedang di sisi lainnya juga mempunyai ikatan dan kesetiaan dengan dunia luar desa.

Bentuk tokoh masyarakat baru lain yang ada di desa Jambangan adalah para pengusaha baru, baik di sektor pertanian maupun sektor non pertanian. Mereka antara lain

seperti yang sedikit di singgung di depan, adalah para petani baru yang menjadi pelopor dalam bidang pertanian modern, dan pengusaha-pengusaha non pertanian, seperti pemilik penggilingan padi, pemilik kendaraan angkutan, dan para pedagang. Berbeda dengan tokoh ekonomi lama yang terutama bersumber pada pemilikan sawah, maka tokoh ekonomi baru ini mengandalkan sumber daya non tanah pertanian sebagai penghasil pendapatan. Mereka ini dapat disebut sebagai kapitalis-kapitalis baru pedesaan, karena sumber daya yang mereka kuasai terutama adalah teknologi modern yang padat modal.

Masyarakat desa Jambangan dengan demikian mempunyai dua jenis Tokoh masyarakat desa, yaitu Tokoh masyarakat lama yang lebih berdasar pada penguasaan sumber daya tanah dan nilai-nilai tradisional, dan Tokoh masyarakat baru yang berdasar atas pemilikan sumber daya modern dan nilai-nilai yang modern juga. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka jumlah dan kualitas Tokoh masyarakat modern semakin bertambah. Bersamaan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin majemuk dan modern, maka peranan para tokoh masyarakat baru pedesaan akan semakin dibutuhkan peranannya. Dengan demikian secara lambat laun peranan tokoh masyarakat lama akan digantikan oleh para tokoh masyarakat baru yang lebih monomorfik. Para tokoh masyarakat baru ini mempunyai peranan yang menentukan terhadap perkembangan masyarakat desa.

Pergeseran peranan tokoh masyarakat baru dalam masyarakat desa Jambangan ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan kelompok-kelompok sosial yang ada, sebagai wadah aktifitas masyarakat. Para tokoh masyarakat lama yang menjadi pemimpin-pemimpin tradisional kelompok-kelompok sosial, seperti perangkat desa, pemimpin kelompok sosial keagamaan, dan pemimpin tradisional lainnya, pada masa lalu adalah tokoh masyarakat yang dominan dan menentukan perkembangan masyarakat. Bersamaan dengan pembangunan masyarakat pedesaan, tentunya telah terjadi perubahan dalam kelompok-kelompok sosial, termasuk di dalamnya perubahan dalam komposisi para elitnya dan anggota kelompok yang

lain. tokoh masyarakat yang hidup di dalam masyarakat adalah suatu jenis tokoh masyarakat yang sesuai dengan situasi masyarakatnya, sehingga dalam masyarakat yang masih tradisional tokoh masyarakat yang dibutuhkan adalah tokoh masyarakat tradisional, dalam masyarakat modern tokoh masyarakat yang dibutuhkan adalah tokoh masyarakat modern, demikian juga dalam masyarakat yang transisional tokoh masyarakat tradisional mulai digeser peranannya oleh tokoh masyarakat modern.

Dalam kelompok kekeluargaan, dimana ikatan sosial antar anggotanya didasarkan pada pertalian garis darah, sedikit banyak juga mengalami perubahan. Pertemuan-pertemuan resmi maupun informal yang dahulu sering terjadi dan dilakukan untuk mengikat tali persaudaraan, kini berangsur-angsur mulai berkurang. Hal itu terjadi ketika mobilitas sosial para anggota mulai meningkat dan hubungan-hubungan sosial dengan masyarakat luar desa semakin banyak, sehingga perhatian terhadap anggota keluarga lainnya juga semakin berkurang. Konsep tradisional “mangan ora mangan asal ngumpul” dalam keluarga, sekarang mulai dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan jaman. Oleh karena kelompok kekeluargaan dalam kasus desa Jambangan ini tidak ada yang terorganisir secara kuat dan tidak melibatkan anggotanya yang besar, maka kurang mempunyai nilai strategis. Ikatan sosial yang masih kuat dan penting, adalah kelompok batih atau keluarga inti.

Kelompok ketetanggaan yang terutama terwujud dalam organisasi komunal tingkat dusun, juga mengalami pemudaran ikatan antar anggotanya. Ikatan ketetanggaan lama relatif cukup kuat, terutama karena adanya persamaan kepentingan di antara mereka dalam pengerjaan sawah. Para pemilik tanah pada umumnya akan meminta bantuan tenaga kerja kepada tetangganya, dalam pengerjaan sawah mereka. Akan tetapi dengan semakin banyaknya warga dusun yang bekerja di luar sektor pertanian, maka ikatan ketetanggaan semakin memudar, karena sebagian warga dusun tidak lagi secara fungsional tergantung dan menggantungkan diri pada bantuan warga lain. Namun demikian ikatan sosial antar warga

tingkat dusun masih tetap penting, karena sebagian besar warga masih bekerja di sektor pertanian. Di samping itu penyelenggaraan kehidupan komunal yang dilandasi oleh nilai-nilai tradisional, masih menandai ikatan-ikatan sosial antar warga. Kelompok ketetanggaan tingkat dusun juga penting karena melibatkan seluruh warga dusun.

Kelompok sosial keagamaan yang secara nyata terwujud dalam kelompok Nahdlatul Ulama, kelompok Muhammadiyah, , dan kelompok “Nasional”, merupakan wadah aktifitas sosial yang penting. Semenjak hilangnya partai-partai politik dalam kehidupan masyarakat desa yang mampu memberi warna ideologi dan menggalang masyarakat desa, maka masyarakat desa menjadi massa mengambang. Kelompok sosial keagamaan, terutama dalam NU, Muhammadiyah, , nampaknya menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan akan kelompok yang mampu memberi warna ideologi dan menggalang masyarakat desa. Meskipun aktifitas keagamaan masih merupakan unsur yang dominan, namun kelompok-kelompok sosial keagamaan ini merupakan unsur yang penting di dalam struktur sosial di desa Jambangan . Pengelompokan ini juga mampu menggalang anggota masyarakat desa Jambangan sesuai dengan pandangan dunia kelompoknya masing-masing, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya perpecahan di antara anggota-anggota kelompok ketetanggaan dan kekerabatan, bahkan kelompok berdasarkan perbedaan status atau kelas.

Dalam masyarakat desa Jambangan lama, dikenal apa yang disebut sebagai kelompok status Pemilik tanah yang menduduki tempat tertinggi, dan kelompok buruh yang menempati posisi di bawahnya. Kedudukan para pemilik tanah itu terutama ditopang oleh penguasaan mereka atas sumber daya utama pedesaan, tanah pertanian yang luas. Karena sawah mereka yang luas dan karena mereka merupakan keturunan cikal bakal, maka mereka berhak menduduki status tersebut. Akan tetapi didalam perkembangan masyarakat desa Jambangan hingga saat ini, menunjukkan bahwa banyak anggota kelompok Pemilik tanah yang telah kehilangan sumber daya pendukungnya. Artinya banyak anggota kelompok

pemilik tanah yang menjadi petani kecil, petani gurem.. Oleh karenanya kedudukan mereka menjadi rapuh, karena meskipun mereka dapat mengaku sebagai pemilik tanah akan tetapi disisi yang lain mereka adalah petani “biasa” seperti para pengarap bahkan buruh tani . Pemudaran kelompok status tersebut juga didukung oleh masuknya nilai-nilai yang menganggap persamaan derajat di antara warga desa.

Untuk membahas tentang terjadinya proses pergeseran tokoh masyarakat pedesaan, dalam kelompok ketetangaan dan kelompok sosial keagamaan. Para Tokoh masyarakat kelompok ketetangaan tercermin dalam susunan perangkat desa, sedangkan tokoh masyarakat dalam kelompok sosial keagamaan dapat dilihat dari masing-masing kelompok NU, Muhammadiyah, . Seperti telah dijelaskan di depan, apa yang disebut sebagai kelompok “Nasional”, adalah terdiri dari orang-orang “Abangan” yang tidak terorganisir seperti kelompok sosial keagamaan lainnya. Dengan demikian mereka juga tidak mengenal pemimpin kelompok, secara formal. ,bahwa sebagian besar (53,85 %) kepala dusun adalah lulusan Sekolah Dasar, sedangkan yang lulusan sekolah lanjutan pertama meliputi 30,77 %, dan yang tidak tamat Sekolah Dasar dan Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas masing-masing 7,69 %. Salah satu sebab mengapa tingkat pendidikan para kepala dusun rendah di desa Jambangan ini, adalah karena jabatan kepala dusun bukan merupakan jabatan yang bergengsi dan menguntungkan secara ekonomis. Beban dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang kepala dusun memang cukup besar, baik sebagai pengesuh (pamong) dusun maupun tugas-tugas dari tingkat desa. Sedangkan tanah jabatan yang diberikan (bengkok) sangat kecil (sekitar 0,5 ha). Sehingga jabatan kepala dusun dianggap sebagai jabatan “sambatan”, yang lebih merupakan kerja sosial tanpa imbalan sehingga jabatan kepala dusun tidak diperebutkan penduduk.

Sama halnya dengan jabatan kepala dusun, maka jabatan modin juga bukan merupakan jabatan yang menarik, sehingga tidak diperebutkan oleh penduduk. Dengan

demikian maka wajar jika para modin terdiri dari mereka yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Dari 8 orang modin yang ada, 2 orang (25 %) diantaranya tidak lulus Sekolah Dasar, sedangkan 3 orang (37,5 %) lainnya adalah lulusan Sekolah Dasar. Jabatan modin bahkan lebih tidak populer dan menarik bagi warga desa Jambangan ini.

Sedangkan jabatan kepala desa merupakan puncak status dalam masyarakat desa Jambangan yang diperebutkan oleh para tokoh masyarakat desa, sedangkan jabatan Kepala Urusan menempati peringkat berikutnya. Kepala Desa Jambangan adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, sedangkan para kepala urusan terdiri dari 2 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, 2 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 1 orang lulusan Sekolah Dasar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar perangkat desa jambangan masih berpendidikan rendah (51,85 %) dan 48,15 % sisanya berpendidikan menengah. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam komposisi tokoh masyarakat pemerintahan desa masih ditandai kurangnya peranan Tokoh masyarakat yang berpendidikan tinggi dan menengah atas. Hal itu terutama disebabkan karena banyak jabatan dalam susunan perangkat desa, kurang memberi jaminan ekonomis yang menarik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergeseran peranan tokoh masyarakat dalam susunan perangkat desa Jambangan, belum terlalu kelihatan menonjol.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada seluruh bagian dapat ditegaskan bahwa Pada pergeseran peranan tokoh kelompok sosial di pedesaan Ngawi ditemukan adanya tata nilai yang konsisten/ajeg dan terbuka yang dapat menjamin sirkulasi. Tata nilai yang konsisten dan terbuka tersebut berdasarkan atas kepemilikan seseorang terhadap :

- a) Kemampuan individu terhadap teknologi dan informasi
- b) Kemampuan ekonomi yang tidak selalu bersumber dari tanah pertanian yang dikelola secara tradisional, tetapi juga bersumber pada pekerjaan diluar tanah pertanian .
- c) Pendidikan umum yang relatif tinggi dari masyarakat sekitarnya

d) Moral dan norma yang didasarkan atas agama/ kepercayaan dan budaya. setempat

Adanya keajegan tata nilai dan sah dalam masyarakat serta terbuka untuk setiap orang dalam rekrutmen pemimpin sosial masyarakat akan menjamin terjadinya pola sirkulasi Pemimpin. Sekalipun pola ini berjalan lambat tetapi sangat kondusif dalam proses menuju sistem politik yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson Benedict R.O G, *Culture and Politics in Indonesia*, (Itaca ,New York)
- Arif Darmawan *Demokrasi Kepentingan Siapa?* Penerbit Untag Press; ISBN.No. 979-9459-34-6 tahun 2005
- Arif Darmawan *Kiai Tradisional & Dinamika Masyarakat* ,Untag Press; ISBN.No.979-9459-21-4, Tanggal terbit 2004.
- Arif Darmawan, *Democratization in Indonesia: Appearance Pattern of “Modern Kiai (Islamic Leaders)” in Moslem Community* , PenerbitPublic Policy and Administration Research ; hal 131-135 ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) Vol.7, No.5, 201
- Arif Darmawan, *Modernisasi Masyarakat Desa* Penerbit LP2i Press; ISBN: 978-602-1056-02-8 Tanggal terbit tahun 2015
- Arif Darnawan, *Democratization in Indonesia: Developmental Mode to Religious Community (Interconnection Study of ‘Government /Regent, Pesantren / Kiai (Islamic Leader) and Community’ in Bondowoso)* , Jurnal Developing Country Studies;hal 25-29 ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.7, No.5, 2017
- Blau, Peter M., *“Heterogeneity and Inequality: A Primitive Theory of Social Structure”*, (The Free Press, New York 1977).
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., *“Introduction to Qualitative Research; A Phenomenological Approach to The Social Sciences”*, (John Wiley & Sons Inc., New York; 1975).
- Effendi, Sofian dan Sairin, Sjafrudin dan Dahlan, Alwi., *“Membangun Martabat Manusia: eranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan”* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992).
- Gidens, Anthony, *“Kapitalisme dan Teori Sosial Modern”*; *Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*, (UI Press, Jakarta 1985).
- Giovanni Sartori, "From The Sociology of Politics To Political Sociology", dalam Seynor Martin Lipset,*Political and Social Science*, (Oxford University Press, New York - London - Toronto, 1969).
- Heryanto, Ariel., *“Perlawanan Dalam Kepatuhan : Esai-Esai Budaya”* (Mizan, Bandung, 2000).
- Jacob,T.,*“Membongkar Mitos Masyarakat Madani”*(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000).
- Juliantara,Dadang (penyunting), *“Arus Bawah Demokrasi”*, (Lapera, Yogyakarta, 2000)
- Kano, Hiroyoshi, *“Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa”*, dalam S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (PT Gramedia, Jakarta, 1984).

- Keller, Suzanne, *"Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern"*, (CV Rajawali, Jakarta, 1984).
- Kodiran, *"Kebudayaan Jawa"* Dalam Koentjaraningrat (ed). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980.
- Koentjaraningrat, *"Kebudayaan Jawa"*, (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984).
- Kroef, Justus van Der, "Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa", dalam S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. (PT Gramedia, Jakarta, 1984).
- McMichael, Philip, *"Development and Social Change"*, (United States of America, 1996).
- Miles, Matthew dan Huberman, Michael., "Analisis Data Kualitatif : buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru," (UI Press, Jakarta, 1992).
- Mills C Wright, *The Power Elite*, (Oxford University Press, New York , the Reprint, 1977)
- Mitchell, J. Clyde, "The Concept and Use of Social Networks" dalam J. Clyde Mitchell (Ed.), *Social Networks in Urban Situation, Analyses of Personal Relationship in Central African Towns*, (Manchester: University of Manchester at University Press, 1969)
- Monografi Kecamatan Paron, Pemda Ngawi Tahun 2016
- Nordholt Nico Schulte, *OJO DUMEH Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan*, (Pustaka Sinar Harapan ,Jakarta ,1987)
- Sill, David., (ed), *International Encyclopedia of Social Sciences*, (The MacMillian Company and The Free Prees, New York, 1972, hal 729).
- Vanniel Robert , *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Diterjemahkan Ny.Zahara Deliar Noer) (Pustaka Jaya , Jakarta ,1984)